

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan beragam budaya, etnis, bahasa, dan agama, sehingga tentu akan memerlukan pemeliharaan serta penghormatan terhadap keberagaman tersebut untuk menjaga integritas Negara Indonesia. Keanekaragaman ini telah membentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural, yang menggabungkan beragam keragaman dalam satu kesatuan (Sari & Najicha, 2022). Sebagai negara yang memiliki keberagaman dalam hal kepercayaan atau agama, setidaknya ada enam agama yang telah diakui secara resmi dalam undang-undang, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 (Christianto, 2013).

Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Menurut data Kementerian Dalam Negeri yang dirilis pada Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia pada saat itu mencapai 272,23 juta jiwa, dengan persentase penduduk Muslim sekitar 86,88% (+ 236,53). Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang tersusun atas keberagaman dan pelbagai macam budaya yang didalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, budaya, dan kebiasaan yang ditekankan pada saling menerima satu sama lain (Sari & Najicha, 2022). Dalam sejarah perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa, dinamika pesantren telah

menjadi bagian integral dari perkembangan negara ini. Kementerian Agama mencatat adanya 26.794 pesantren yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Meskipun istilah "Pesantren" memiliki variasi sebutan di berbagai budaya lokal di seluruh daerah, hal ini menjadi familiar bagi umat Islam di Indonesia. Jika dilihat dari sudut pandang sejarahnya, Pesantren telah menjadi arsip penting dalam mencatat berbagai peristiwa sejarah sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia (Abdurrahman, 2018).

Secara umum, suatu pondok pesantren yang berawal dari adanya seorang kyai di suatu daerah tersebut, yang kemudian datang seorang santri dengan memiliki niat untuk belajar ilmu agama kepadanya. Setelah semakin hari semakin banyak para santri yang berdatangan dari lingkungan sekitar, maka timbul dengan adanya inisiatif untuk mendirikan pondok ataupun asrama di samping rumah kyai hingga memiliki tempat untuk belajar mengaji para santri (Wahab, 2004).

Pondok Pesantren Miftahul Huda Dua didirikan pada tanggal 1 November 1976 oleh K.H. Umar Nawawie (Apa) dan Hj. Neneng Mudrikah (Amah). Pada awal berdirinya, pesantren tersebut belum memiliki pondok dan fasilitas sekolah formal seperti yang ada saat ini. Awalnya, bangunan pesantren hanya terdiri dari sebuah rumah yang dibagi menjadi dua ruangan, satu untuk tempat tinggal kiai dan satu lagi berfungsi sebagai musala tempat santri belajar. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Miftahul Huda II mengalami perkembangan pesat, bahkan hingga saat ini, pesantren ini terus berkembang dan maju.

Jumlah santri di Pesantren Miftahul Huda Dua seiring dengan berjalannya waktu sehingga terus bertambah dari tahun ke tahun berikutnya, sehingga dapat menghasilkan murid serta banyak alumni dari pesantren ini. Para alumni dengan memiliki berbagai macam jalur kehidupan yang berbeda-beda, dan salah satunya adalah yang terlibat dalam aktivitas politik, seperti calon anggota legislatif tahun 2019 yakni Ipah Hudaifah yang berhasil memenangkan Pileg Kabupaten Ciamis pada tahun 2019.

Para alumni Pesantren Miftahul Huda Dua membentuk sebuah komunitas yang disebut HAMIDU (Himpunan Alumni Huda Dua). Komunitas ini memiliki basis massa yang kuat karena terjalinnya hubungan kekeluargaan yang erat di antara mereka. Selain itu, HAMIDU juga membentuk koordinator pada jaringan sosial yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ciamis, sehingga menjadi agen mobilisasi politik di wilayah tersebut.

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan model asrama (kompleks) serta para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajaran atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan seorang atau beberapa orang Kyai dengan ciri khas yang bersifat karismatik serta independent dalam segala hal (Qomar, 2005).

Pesantren dalam tantangan dari berbagai zaman yang telah menunjukkan eksistensinya dan tercatat sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren dituntut untuk senantiasa tampil dengan maksimal dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan mencetak generasi yang mampu mempertahankan tradisi pesantren tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan pesantren merupakan sosok lembaga pendidikan yang paling ideal dalam sistem pendidikan nasional. Sehingga tanpa adanya pesantren, lembaga pendidikan Islam di Indonesia tersebut tidak akan berkembang, karena sistem pesantren tersebut telah memberikan warna terhadap pendidikan Islam yang secara terus menerus berkembang dengan adanya suatu inovasi

yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta adanya tuntutan zaman (Nata, 2001).

Secara umum tujuan dan fungsi dari Pondok Pesantren pada esensinya adalah mewujudkan manusia dan masyarakat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Pondok Pesantren berperan untuk membentuk manusia sebagai makhluk religius, yakni manusia yang senantiasa berpegang pada nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup manusia. Menurut (Daradjat, 2006) tujuan pengembangan Pondok Pesantren yang diantaranya dapat diarahkan untuk :

1. Mendidik santri untuk menjadi anggota masyarakat, seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga Negara yang ber-Pancasila.
2. Mendidik santri menjadi manusia muslim dan kader ulama serta mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, memiliki semangat wiraswasta serta mengamalkan syari'ah Islam secara utuh dan dinamis.
3. Mendidik para santri agar dapat menjadi tenaga-tenaga penyuluh pembangunan makro, regional (pedesaan/masyarakat lingkungan) serta nasional.
4. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan dan negara.

Secara historis, fungsi utama pesantren adalah sebagai institusi pendidikan Islam. Namun, pesantren juga memiliki peran yang signifikan dalam arena politik di tengah masyarakat tradisional. Oleh karena itu, pesantren selalu terlibat dalam dinamika politik, dan banyak pesantren akhirnya terlibat dalam aktivitas politik. Tingkat dan bentuk keterlibatan pesantren dalam politik dapat beragam, baik melalui partisipasi langsung maupun tidak

langsung. Ini terlihat saat momen-momen politik penting seperti pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), atau pemilihan kepala daerah (pemilukada).

Dalam perjalanannya setiap tahun, tidak dapat mengherankan jika pesantren yang merupakan tempat dimana para santri belajar yang sangat sulit untuk terlepas dari berbagai macam aspek kegiatan politik, karena aktivitas politik yang sangat erat kaitannya dengan cara bagaimana setiap "kultur sosial" yang dapat dimasukkan ke dalam tradisi politik. Setiap partai politik, pada dasarnya, akan mengusung ideologi yang dapat mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai budaya dari masyarakatnya tersebut (Qomar, 2005).

Keterkaitan antara pesantren dan politik pada perjalanannya telah dikenal sebagai suatu fenomena yang telah dianggap biasa oleh masyarakat di Kabupaten Ciamis. Bahkan, massa salah satu jaringan yang terkait dengan pesantren yakni jaringan Hamidu dapat membentuk suatu kekuatan politik untuk berbagai kepentingan internal jaringan atau aktor politik yang mempunyai kedekatan dengan jaringan tersebut. Pada Pemilu legislatif 2019 yang lalu legalitas Hamidu yang menjadi salah satu bagian dari program yang telah ditawarkan oleh calon anggota legislatif.

Keterlibatan instrumen jaringan sosial dalam Pemilu tidak boleh diabaikan. Kelompok aksi, kelompok *ad-hoc*, gerakan sosial, dan organisasi struktural lainnya telah menjadi agen utama dalam mobilisasi pemilih. Peran aktor jaringan sosial ini mencakup menerima berbagai jenis informasi dan panduan dari partai politik dan calon, kemudian mendorong anggota jaringan untuk ikut serta dalam proses pemilihan. Akibatnya, peran aktor jaringan sosial ini secara signifikan meningkatkan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Salah satu aktor jaringan sosial yang terdapat di masyarakat adalah Pondok Pesantren. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pesantren memiliki keterlibatan dalam kegiatan politik di Indonesia. Salah satu contoh pesantren yang terlibat dalam kegiatan politik yaitu Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 yang terdapat di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Faktor jaringan sosial sebagai agen mobilisasi pemilih menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu mempunyai beberapa potensi untuk memberikan pengaruh yang signifikan dalam konteks politik lokal, menjalin relasi dengan jaringan sosial merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dihindari. Terutama karena kemampuan aktor jaringan sosial dalam menciptakan lingkungan politik yang kondusif dan mendorong partisipasi masyarakat, termasuk dalam mobilisasi pemilih. Kontribusi nyata yang dilakukan para aktor jaringan sosial misalnya terlibat langsung dalam kampanye blusukan bersama pasangan calon kandidat menampilkan fenomena baru dan menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Mobilisasi politik merupakan suatu aktivitas atau kegiatan politik yang bukan berdasarkan keinginan sendiri tetapi atas dorongan dan ajakan dari pihak lain dalam arti dikerahkan secara sengaja. Misalnya kegiatan aksi pembatalan hasil Pemilu atau memaksa masyarakat untuk mendukung calonnya yang di koordinir oleh team sukses dari kandidat, massa melakukannya tidak atas inisiatif sendiri. Mobilisasi yang dilakukan untuk mencari dukungan tentunya tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh. Akan tetapi, ada juga yang sebagian besar memaksa anggota keluarganya untuk memilih calon yang dia dukung sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga, yang dimana mereka mengajak keluarga atau masyarakat untuk memilih pasangan calon yang mereka unggulkan dan mereka tidak segan-segan memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat (Elwan, 2019).

Pada kasus ini, Hamidu melakukan praktik mobilisasi terhadap jaringannya untuk memenangkan calon anggota legislatif yang dari awal telah dicalonkan oleh petinggi atau elit HAMIDU, yakni Ipah Hudaifah. Ipah Hudaifah ini merupakan salahsatu alumni pondok pesantren Miftahul Huda Dua yang dianggap oleh elit HAMIDU mampu untuk melaksanakan Visi HAMIDU di legislatif. Pada masa di Pesantren, Ipah merupakan salahsatu santri yang aktif dalam kehidupan kampus dan dianggap oleh elit HAMIDU mempunyai kemampuan berpikir kritis sehingga didorong untuk terjun ke dalam kehidupan Politik. Oleh karena itu, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Mobilisasi Jaringan HAMIDU dalam Pemenangan Ipah Hudaifah Pada Pileg Kabupaten Ciamis 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini yakni “Bagaimana mobilisasi jaringan HAMIDU terhadap kemenangan Ipah Hudaifah pada Pileg Kabupaten Ciamis tahun 2019?”

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah terhadap permasalahan agar terarah dan terkonsentrasi dalam setiap melakukan penelitian. Adapun dalam pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu membahas Bagaimana mobilisasi jaringan HAMIDU terhadap kemenangan Ipah Hudaifah pada Pileg Kabupaten Ciamis tahun 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mobilisasi jaringan HAMIDU terhadap kemenangan Ipah Hudaifah pada Pileg Kabupaten Ciamis tahun 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak untuk melakukan penelitian yang terbaru yakni sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmu-ilmu sosial dan politik, khususnya mengenai pesantren dan politik.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi yang membaca mengenai hubungan pesantren dan politik.